

Judul : Pembahasan RKUHP berpeluang tidak tuntas dalam waktu dekat
Tanggal : Jumat, 18 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembahasan RKUHP Berpeluang Tidak Tuntas dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS — Proses perumusan dan sinkronisasi pasal setelah pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau DIM RKUHP baru berjalan 45 persen. Sementara itu, masa sidang DPR saat ini sebentar lagi akan berakhir. Meski begitu, Komisi III DPR berjanji tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam membahas RKUHP dan membuka kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hince Panjaitan menyatakan, penyisiran draf RKUHP oleh tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus dan Timsin) masih terus bergulir. Hal ini memerlukan kehati-hatian sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.

Penyisiran dilakukan setelah Panja RKUHP DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan DIM RKUHP yang berjumlah 1.676 poin dari total 334 pasal pada 9-10 Juli 2025. Menurut rencana, hasil penyisiran tersebut akan diserahkan kedua tim ke Panitia Kerja (Panja) RKUHP untuk dibahas kembali pada Senin (21/7/2025).

Sementara itu, masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, yang berlangsung dari 24 Juni 2025, akan berakhir pada 24 Juli 2025. Setelah itu, DPR kembali masuk masa reses.

Dengan waktu masa sidang yang tinggal sepekan, Hince menilai kemungkinan pengambilan keputusan tingkat II RKUHP atau persetujuan pengesahan di Rapat Paripurna DPR semakin kecil. Apalagi, pihaknya masih perlu mengoreksi dan memberikan masukan terhadap hasil kerja Timus dan Timsin sebelum pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah.

"Sampai siang ini (progres penyisiran) baru sekitar 45 persen. Jadi, Timus Timsin masih merapikan ketikan dan susunannya. Kalau lihat jadwal yang begitu mepet, saya belum bisa memastikan (pembahasan) apakah bisa ke tingkat II. Tingkat I pun belum tentu selesai," ujarnya saat di-

temui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7).

Hince menekankan, proses pembahasan oleh Komisi III bakal hati-hati karena RKUHP kelak akan jadi payung hukum acara pidana yang bakal dipergunakan untuk proses penegakan hukum.

"Agar jangan salah, begitu ya, karena KUHP ini dipakai secara operasional tiap hari di negara ini. Ini soal kita (warga negara), jadi perlu kehati-hatian. Masih butuh waktu menuntaskan ini, karena kita ke-jamnya (KUHP) berlaku bersamaan dengan KUHP yang akan datang. Kalau (rampung) lebih cepat, tentu aparat penegak hukum punya waktu menyesuaikan," tuturnya.

Di tengah waktu yang masih tersedia ini, Hince menyebut Komisi III DPR masih membuka peluang bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan masukan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika RKUHP belum tuntas sampai akhir masa sidang, pembahasan tetap dilakukan di masa reses.

"Kalau kami anggap ada urgensi, bisa saja di masa reses ada yang kembali ke DPRD sebentar, lalu bahas, dan kemudian kembali lagi ke dapil masing-masing," ucapnya.

Aspirasi yang terbuka ini juga untuk pihak-pihak yang mengkritisi RKUHP. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menganggap RKUHP kali ini melemahkan upaya penegakan hukum lembaga antirasuah tersebut.

"Sekali lagi, ini (pembahasan RKUHP) masih terbuka kepada siapa pun. Akan tetapi, tolong dibaca juga DIM-nya. Jangan sampai kita berdebat tanpa ada substansinya. Misalnya masalah penyadapan. Itu, kan, jadinya tidak diatur (RKUHP), karena akan ada undang-undang tersendiri," kata Hince.

Sebelumnya, hasil kajian KPK bersama sejumlah pakar hukum menemukan setidaknya 31 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja KPK. Sejauh ini, KPK belum diundang Komisi III DPR untuk didengar masukannya terkait RKUHP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menga-

takan, pihaknya tetap akan memberikan masukan ke DPR dan pemerintah.

Dokumen di laman DPR

Sementara itu, setelah di-kritik berbagai pihak terkait transparansi dokumen RKUHP, DIM RKUHP, serta hasil kerja-kerja pembahasan RKUHP, DPR mengunggah dokumen-dokumen itu di laman resminya, dpr.go.id. Publik terbuka untuk mengunduh dokumen-dokumen tersebut.

Sebelum akhirnya dokumen bisa diakses publik, pada Rabu (16/7) malam, Ketua Komisi III DPR Habiburokman sempat mengkritik kinerja Sekretaris Jenderal DPR karena laman DPR tak bisa diakses. Padahal, akses itu penting agar publik bisa melihat progres pembahasan RKUHP. Selang beberapa saat, laman DPR bisa diakses. Namun, dokumen terkait RKUHP tak ada di laman tersebut. Habiburokman kembali mengkritik kinerja Setjen DPR hingga akhirnya dokumen-dokumen tersebut bisa diunduh dari laman DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar beralasan, situs resmi DPR, dpr.go.id, kerap mendapatkan serangan siber. Aksi tersebut diketahui lewat pemantauan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kepolisian yang bekerja sama dengan DPR untuk mengelola situs.

"Jadi, seringkali, ratusan, bahkan ribuan kali situs web DPR itu ada upaya-upaya penyerangan, *hack* (peretasan). Kalau sudah banyak dan pada *traffic* tingkat tinggi, pilihan kami harus dimatikan. (Sehabis), kalau tidak dimatikan dan berhasil masuk ke dalam, itu akan merusak sistem kami," kata Indra.

Ia pun menekankan, keputusan untuk menutup situs itu juga dilakukan sesuai rekomendasi lembaga-lembaga terkait tersebut. "Jadi, apa yang disampaikan itu (situs terkendala) memang karena beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan. Sebab, banyak sekali *hacker* yang mencoba untuk masuk dan menerobos sistem kita," katanya. (HTG)